

ABSTRAK

Penelitian ini **dilatar-belakangi** oleh adanya masalah defisit APBN yang meningkat dan akumulasi utang pemerintah yang memunculkan keharusan efisiensi belanja, serta krisis ekonomi dan inflasi tinggi di Argentina yang mendorong penataan kabinet. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Decree 70/2023 *Bases Para la Reconstruccion de la Economia Argentina*, menjadi langkah serius Pemerintah Indonesia dan Argentina dalam mewujudkan kebijakan efisiensi anggaran.

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian** hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan memakai legislasi dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini adalah perbandingan antara Negara Indonesia dengan Argentina.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi anggaran di Indonesia menginstruksikan penghematan belanja operasional. Namun, secara kontradiktif jumlah kementerian meningkat dari 34 menjadi 48 sehingga inefisiensi pada beban anggaran. Sementara di Argentina mekanisme kebijakan efisiensi diterapkan secara radikal lewat memangkas jumlah kementerian dari 18 menjadi 8 serta pengurangan secara masif diberbagai sektor pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan pendekatan yang berbeda, di Indonesia kebijakan efisiensi mempertimbangkan aspek politik dan hukum, sedangkan di Argentina kewenangan eksekutif dipertegas melalui dekret.

Kata kunci : kebijakan efisiensi anggaran, postur kabinet, Indonesia, Argentina

ABSTRACT

***This research** is motivated by the problem of the increasing state budget deficit and the accumulation of government debt, which led to the need for spending efficiency. Additionally, the economic crisis and high inflation in Argentina have encouraged cabinet restructuring. Presidential Instrusction Number 1 of 2025 and Decree 70/2023, Bases Para la Reconstrucción de la Economía Argentina, represent a significant step taken by the Governments of Indonesia and Argentina in implementing budget efficiency policies.*

*This research uses **normative legal research meethods**. The approach used is a combination of the statue approach and the comparative approach. The statutory approach utilises legislation and regulations relevant to this research. The comparative approach in this research is a comparasion between Indonesia and Argentina.*

***The results** show that budget efficiency in Indonesia results in savings in operational expenditure. However, contradictorily, the number of ministries increased from 34 to 48, resulting in inefficiency in the budget burden. Meanwhile, in Argentina, the efficiency policy mechanism was implemented radically by reducing the number of ministries from 19 to 8, as well as through massive reductions in various government sectors. The results show different approaches. In Indonesia, the efficiency policy considers political and legal aspects, while in Argentina, the excecutive authority is emphasised through decrees.*

Keywords : budget efficiency policy, cabinet posture, Indonesia, Argentina